

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perizinan usaha pedagang kaki lima dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi administratif dalam perizinan usaha pedagang kaki lima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan perizinan usaha pedagang kaki lima bahwa beberapa peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara jelas dan tegas mengenai sanksi administratif terhadap pedagang kaki lima secara khusus terkait tindakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima selain permasalahan tersebut, pengaturan izin tempat usaha pedagang kaki lima sampai saat ini belum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan belum dikeluarkannya peraturan walikota yang mengatur penetapan lokasi tempat usaha berdagang pedagang kaki lima yang dibolehkan; 2) bentuk sanksi administratif dalam perizinan usaha pedagang kaki lima yaitu memberikan teguran secara lisan; memberikan teguran secara tulisan (surat pernyataan); dan pemerintah kota melakukan tindakan langsung ke lapangan dengan tidak mengizinkan berjualan lagi. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan bahwa hal yang penting terkait dengan sanksi administratif ini adalah bahwa setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum. Bagi yang pejabat administrasi negara yang akan mengenakan sanksi administratif harus memastikan bahwa betul-betul telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada waktu menerapkan sanksi tersebut telah diperhatikan/dipertimbangkan betul asas-asas umum pemerintahan yang baik, misalnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan sebagainya. Hendaknya pedagang kaki lima yang ingin membuka lapak diharapkan dapat memahami prosedur atau syarat untuk pengajuan tanda daftar usaha sebagai izin pedagang kaki lima untuk menempati lokasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku selain itu hendaknya Pemerintah memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang berkaitan dengan PKL agar PKL memahami syarat apa yang harus dipenuhi sebelum membuka lapak.

Kata Kunci: *Sanksi Administratif, Usaha Pedagang Kaki Lima, Pengaturan*

ADMINISTRATIVE SANCTIONS REGULATION ON STREET VENDOR BUSINESS ACCORDING TO STATUTORY REGULATIONS

ABSTRACT

This study aims 1) To find out and analyze the business licensing regulation of street vendors and 2) to find out and analyze. Form of administrative sanctions in the business licensing of street vendors. The research method used is the normative legal research method and the approach used is the legislation approach and conceptual approaches and case approaches. Analysis of legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all legislation and assessing relevant legal materials. The results showed that 1) Settings of street vendors business licensing that several laws and regulations do not determine clearly and firmly regarding administrative sanctions against street vendors specifically related to the action of structuring and empowering street vendors in addition Street, until now has not been in accordance with the applicable laws and regulations, this is due to the issuance of the Mayor Regulation which regulates the determination of the location of the business where the street vendors are allowed; 2) form of administrative sanctions in the business licensing of street vendors, namely giving verbal reprimands; give a warning in writing (statement letter); And the city government took direct action to the field by not allowing to sell again. From the results of the study it can be recommended that the important thing related to administrative sanctions is that every imposition of administrative sanctions must have a legal basis and accompanied by the possibility for those affected by sanctions to submit legal efforts. For those who will impose administrative sanctions must ensure that there has been a violation of the provisions of the legislation and when applying the sanctions has been considered/considered generally the general principles of good government, for example the principle of accuracy, the principle of certainty law, the principle of balance and so on. Street vendors who want to open stalls are expected to understand the procedure or conditions for submitting a business list as a permit for street vendors to occupy locations in accordance with the prevailing regional regulations besides that the government should provide socialization about regional regulations relating to street vendors so that street vendors understand What conditions must be met before opening the stalls.

Keywords: Administrative sanctions, street vendors business, arrangement